

BAB III

DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PERTAHANAN AKTIF JEPANG DALAM MENANGANI ICBM KOREA UTARA

Berkembangnya persenjataan nuklir Korea Utara mampu menimbulkan persoalan yaitu memanasnya konstelasi politik-keamanan internasional, khususnya di wilayah Laut China Selatan dan Asia Timur. Kondisi ini kemudian berkembang semakin kompleks, ketika hubungan Korea Utara dengan negara-negara Asia Timur belum menacapi rekonsiliasi, diantaranya dengan Korea Selatan dan Jepang. Inilah yang kemudian menimbulkan rasa kekhawatiran karena daya jangkau ICBM Korea Utara yang sewaktu-waktu dapat menjangkau wilayah Jepang.

Dalam menindak lanjuti ICBM Korea Utara kemudian Jepang dan Amerika Serikat sebagai dua negara yang bersekutu dan memiliki hubungan penting kemudian menjalankan kerjasama yang berhasil merubah sistem pertahanan Jepang yang semula pasif menjadi aktif. Hal ini menjadi kasus yang menarik karena sejak perang dunia II, Jepang memiliki konsensus untuk tidak mengembangkan armada tempur berkaitan dengan pasal 9 konstitusi Jepang. Gambaran mengenai dukungan Amerika Serikat terhadap sistem pertahanan Jepang tersebut akan diuraikan pada bab III sebagai berikut.

A. Deskripsi Bidang Pertahanan Jepang

Sistem pertahanan dan militer Jepang ternyata telah menunjukkan sebuah konsep sistem pertahanan negara yang modern, dimana terdapat fungsi pembagian matra (divisi) yaitu angkatan darat, laut dan udara, serta beberapa sub-divisi lainnya. JSDF (*japan self defense force*) juga memiliki sistem persenjataan yang modern yang sebagian besar diperoleh dari Amerika Serikat. Hal

yang membedakan adalah kewenangan agen pertahanan yang begitu dibatasi.

Angkatan bersenjata Jepang dikenal juga dengan nama Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) merupakan angkatan yang didirikan setelah berakhirnya pendudukan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Meskipun pada sebagian besar periode pasca perang pasukan ini beroperasi terbatas pada pulau-pulau di Jepang dan tidak diizinkan beroperasi di luar negeri. Jika ditinjau dari personel dan organisasi, JSDF memiliki 239.430 orang personel (data tahun 2005), yang terdiri dari 147.737 orang pada Angkatan Darat Bela Diri Jepang, 44.327 orang pada Angkatan Laut Bela Diri Jepang, 45.517 orang pada Angkatan Udara Bela Diri Jepang, dan 1.849 orang pada Kantor Komando Gabungan, Pasukan cadangannya berjumlah 57.899 orang.²⁸

Sejak tahun 2005, Angkatan bersenjata Jepang semakin meningkatkan anggaran pertahanan. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Jepang untuk mengembangkan bidang pertahanan dan militer dalam rangka mengantisipasi ancaman terkini, termasuk program arms build up yang dijalankan Cina. Gambaran mengenai bentuk peningkatan anggaran Jepang ini dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Peningkatan Anggaran Pertahanan Jepang
Tahun 2005-2014

No	Tahun	Jumlah Anggaran Pertahanan (Milyar US Dollar)
1.	2005	29,5
2.	2006	29,6
3.	2007	28,7
4.	2008	29,8
5.	2009	41,3

²⁸ “Japan Self Defense Force”, dalam <http://thediplomat.com/tag/japan-self-defense-forces/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

6.	2010	43,8
7.	2011	55,9
8.	2012	57,9
9.	2013	59,1
10.	2014	59,8

Sumber : James Eldgar Chow, "Japan Military Budget",
Journal of Public Policy and Defense, University of
Nanyang Singapore, 2016, chapter iii.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di tahun 2005 anggaran pertahanan Jepang hanya sebesar 29,5 milyar US Dollar. Lima tahun kemudian di tahun 2010 telah meningkat menjadi 43,8 milyar US Dollar dan di tahun 2014 terus meningkat menjadi 59,8 milyar US Dollar atau mendekati dua kali lipat dibandingkan dengan sepuluh tahun terakhir. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Jepang sedang menghadapi dinamika dan konstelasi keamanan regional yang membutuhkan padat anggaran dan teknologi, sehingga sejak tahun 2005 hingga 2014 belum pernah sekalipun mengalami penurunan.

Angkatan bersenjata Jepang memiliki bentuk unik, dimana semua personel Pasukan Bela Diri Jepang secara teknis adalah warga sipil. Mereka yang berseragam diklasifikasi sebagai personel khusus dan tunduk kepada para personel biasa yang bekerja di *Japan Defense Ministry*. Tidak ada rahasia militer, hukum militer, atau pelanggaran militer yang dianggap dapat dilakukan oleh seorang personel militer; baik di dalam atau di luar pangkalan militer, ketika bertugas atau di luar tugas, mengenai masalah militer atau non-militer. Semua hal tersebut diputuskan dalam prosedur normal oleh pengadilan sipil, dalam yurisdiksi yang sesuai.

JSDF ternyata telah merujuk pada sistem pertahanan modern. Secara institusional JSDF terbagi atas tiga matra, masing-masing yaitu :²⁹

1. *Japan Ground Self-Defense Force*, atau disingkat *JGSDF*. Merupakan matra terbesar di antara ketiga angkatan JSDF Angkatan Darat Bela Diri Jepang beroperasi di bawah komando seorang kepala staf pasukan darat, yang berbasis di kota Ichigaya, Tokyo yang memiliki jumlah personel sekitar 147.000 orang tentara.

JGSDF dibentuk pada tahun 1954 dan memiliki berbagai varian alutsista canggih, diantaranya MBT (main battle tank) 10, Howitser M-110 dan APC (*armored personel carrier*) jenis tipe 96. JGSDF terbagi atas lima wilayah komando, masing-masing yaitu :

- a. JGSDF bagian wilayah utara yang berpusat di Sapporo Hokaido.
- b. JGSDF bagian wilayah timur laut yang berpusat di Sendai, Miyagi.
- c. JGSDF bagian wilayah timur yang berpusat di Nerima, Tokyo.
- d. JGSDF bagian wilayah tengah yang berpusat di Itami, Hyogo.
- e. JGSDF bagian wilayah barat yang berpusat di Kumamoto.

JGSDF sejak tahun 2002 hingga tahun 2014 memiliki berbagai varian alutsista modern gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

²⁹ “Japan Military Guide”, dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

Tabel 3. 2 Kuantitas Alutsista Darat *Japan Ground Self-Defense Force* (JGSDF) Tahun 2002-2014

No.	Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2006	Tahun 2010	Tahun 2014
1.	Tank utama	900	1050	950	950
2.	Persenjataan	860	860	860	900
3.	artileri	550	600	600	600
4.	Panser (APC) Helikopter	100	75	75	60

Sumber : “Japan Ground Self-Defense Force : Military Equipment”, dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/jgsdf.htm>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

Dari paparan tabel 3.2. di atas maka dapat diketahui bahwa alutsista darat Jepang dari tahun 2002 hingga 2014 ternyata bersifat tetap. Bahkan pada helikopter atau tank utama cenderung mengalami penurunan. Hal ini tentunya akan berdampak pada efektifitas sistem pertahanan Jepang, terlebih lagi pada periode 1998-2008 Jepang sering terlibat ketegangan dengan negara-negara lain, khususnya Korea Utara dan Cina.

2. *Japan Maritime Self-Defense Force*, atau disingkat *JMSDF* merupakan pasukan maritim bersenjata dari yang bertugas melakukan pertahanan laut Jepang. Ia dibentuk setelah dibubarkannya Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pasca Perang Dunia-II Angkatan ini memiliki armada yang besar dengan kemampuan operasi laut lepas yang signifikan. Kekuatan persenjataannya secara ketat ditujukan untuk pertahanan militer. Tugas utama angkatan ini adalah mempertahankan kendali negara atas jalur pelayaran dan melakukan patroli perairan teritorial. Angkatan ini berkekuatan resmi sekitar sekitar 45.800 personel.

JMSDF dibentuk pada tahun 1952 dan memiliki berbagai varian alutsista canggih, diantaranya Aegis Ballistic Missile, UH-60 Black Hawk, divisi Flet Escort Force yang terdiri dari berbagai varian helikopter dan pesawat tempur generasi ke III dan ke IV. JGSDF terbagi wilayah-wilayah strategis Jepang, antara lain Kanoya, Hachinohe, Tateyama dan Iwakuni.

JMSDF hingga pada periode 2002 hingga 2014 memiliki berbagai varian alutsista modern gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Kuantitas Alutsista Laut *Japan Maritime Self-Defense Force* (JMSDF) Tahun 2002-2014

No.	Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2006	Tahun 2010	Tahun 2014
1.	Kapal Korvet	85	80	85	85
2.	Kapal pendarat	70	70	75	74
3.	tank	15	15	20	15
4.	Kapal evakuasi	8	8	10	10
5.	Kapal selam Penerbangan laut	35	35	35	30

Sumber : “Japan Maritime Self-Defense Force : Military Equipment”, dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/jmsdf.htm>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

Dari paparan tabel 3.3. di atas maka dapat diketahui bahwa alutsista laut Jepang dari tahun 2002 hingga 2014 ternyata bersifat fluktuatif. Bahkan pada varian kapal jenis kapal penerbangan laut cenderung mengalami penurunan. Hal ini tentunya akan berdampak pada efektifitas sistem pertahanan Jepang dalam menghadapi persoalan keamanan yang terjadi.

3. *Japan Air Self-Defense Force*, atau disingkat *JASDF* merupakan pasukan udara bersenjata dari Pasukan Bela Diri Jepang, yang bertanggung jawab atas pertahanan udara Jepang dan operasi udara lainnya. Angkatan ini melakukan patroli keamanan udara di sekitar Jepang, serta juga memelihara jaringan luas sistem radar peringatan dini di darat dan udara. Angkatan ini memiliki sekitar 45.000 personel dan 474 pesawat siap tempur.

JASDF dibentuk pada tanggal 1 Juli 1954 dan memiliki berbagai varian alutsista canggih, diantaranya F-35 Lightning II, F-4 Phantom, CH-47 Chinook dan berbagai varian alutsista udara lainnya. JASDF terbagi atas beberapa divisi, yaitu :

- a. Komando Pertahanan Udara (*Air Defense Command*) yang berpusat di Yukata, Fussa-Tokyo.
- b. Komando Udara Pendukung (*Air Support Command*) yang berpusat di Fuchu, Tokyo.
- c. Komando Pengujian dan Pengembangan Udara (*Air test and Development Command*) yang berpusat di Saitama.
- d. Komando Perangkat dan Peralatan Udara (*Air Material Command*) yang berpusat di Jujou, Tokyo.

JASDF sejak tahun 2002 hingga tahun 2014 memiliki berbagai varian alutsista modern, yang berhasil diperoleh dari pembelian atau hibah luar negeri, khususnya dari Amerika Serikat namun dari tahun ke tahun jumlahnya tidak banyak mengalami perubahan gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Kuantitas Alutsista Udara *Japan Air Self-Defense Force (JGSDF)* Tahun 2002-2014

No.	Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2006	Tahun 2010	Tahun 2014
1.	Pesawat fighter	55	55	60	55
2.	Pesawat angkut	15	20	15	15
3.	berat	20	20	15	15
4.	Pesawat	10	15	15	20
5.	surveyor	15	15	12	12
6.	Pesawat maritim	40	40	45	45
7.	Pesawat	35	35	30	30
8.	evakuasi/riset	58	62	62	68
	Pesawat latih				
	Helikopter				
	Pesawat angkut personel				

Sumber : “Japan Ground Self-Defense Force : Military Equipment”, dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/jgsdf.htm>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angkatan udara merupakan tolak ukur sistem pertahanan Jepang. Pada divisi/matra ini teknologi mutakhir menjadi tumpuan pemerintah Jepang selama ini dalam menjaga kedaulatan wilayah negara ini karena ketergantungan Jepang selama ini dengan pihak Amerika Serikat. Jumlah alutsista udara yang dimiliki Jepang pada tahun 2002 hingga 2014 ternyata cenderung fluktuatif. Terdapat beberapa yang jumlahnya mengalami peningkatan, seperti halnya pesawat fighter, namun terdapat juga varian lainnya yang mengalami penurunan, seperti halnya pesawat evakuasi atau pesawat surveyor.

B. Dukungan Amerika Serikat Dalam Pengembangan Sistem Pertahanan Aktif

Sistem pertahanan merupakan bagian kebijakan pertahanan suatu negara. Melalui sistem yang terarah maka suatu negara dapat mencapai kepentingannya pada bidang keamanan secara efektif. Jepang merupakan negara yang berhasil merubah paradigma pertahanan dari pasif menjadi aktif yang salah satunya karena dipicu oleh ICBM Korea Utara.

1. Perubahan Sistem Pertahanan Jepang

Seiring dengan berkembangnya waktu terjadi pergeseran orientasi pertahanan Jepang dari pasif berkembang menjadi model pertahanan aktif. Hal ini dapat dilihat pada *National Defense Program Guideline* (NDPG) pada tanggal 10 Desember 2004. Kebijakan ini akan diberlakukan pada tahun 2005. Salah satu ketentuan penting dalam NDPG adalah langkah pengamanan Jepang yang berkaitan dengan mobilisasi, dimana Jepang harus kuat sebelum bantuan Amerika Serikat datang.³⁰

Pada bulan Juni 2006, pemerintah Jepang menyusun rancangan undang-undang untuk mempersiapkan pembentukan kementerian pertahanan (yang terlaksana di akhir tahun 2006). Penggantian nama “*self defense agency*” menjadi “*ministry of defense*” yang dipimpin oleh seorang menteri kabinet, sebagai tanda dimulainya proses transisi menjadikan “pasukan beladiri Jepang” (SDF) sebagai angkatan bersenjata reguler, yang tentunya akan segera diikuti dengan pengembangan kebijakan politik pertahanan dan sistem persenjataan pertahanan Jepang yang dise-

³⁰ “National Defense Program Guideline : Program Outline”, dalam <http://csis.org/files/media/isis/pubs/jw041220.pdf>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018.

suaikan dengan ancaman dan gangguan terhadap kedaulatannya.

Pada tanggal 9 Januari 2007 terjadi kasus politik keamanan yang menarik, dimana pemerintah Jepang berhasil merubah Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency/JDF*) menjadi Departemen Pertahanan Jepang (*Japan Ministry of Defense*). Keputusan ini dijalankan saat kabinet Jepang berada di bawah masa kepemimpinan Shinzo Abe.³¹

Keberadaan DPJ (*democratic party of japan*) dalam perubahan orientasi pertahanan ternyata tidak membuat citra dan popularitas partai ini menjadi terpuruk. Hal ini dapat dilihat peningkatan elektabilitas DPJ pada pemilu tahun 2009 sebagai pemilu pertama pasca diterapkannya perubahan orientasi pertahanan Jepang tersebut. Pemilu Jepang tahun 2009 berhasil diselenggarakan oleh pemerintah negara ini pada 30 agustus 2009, yang ditujukan untuk memilih calon wakil rakyat dari Majelis Rendah yang terdiri dari 480 kursi. Keberadaan Jepang sebagai negara bercorak parlementer kemudian secara otomatis akan membawa elit partai (pemimpin) untuk menjabat sebagai perdana menteri Jepang.

Hasil akhir perhitungan pemilu 2009 ternyata menjadi hal yang tidak populer karena LDP (*Liberal Democratic Party*), berhasil dikalahkan oleh partai oposisi DPJ yang dalam sepanjang sejarah Jepang baru dua kali mengalami kemenangan, yaitu tahun 1993/1994. Sejak dibentuk pada tahun 1955, LDP hanya pernah mengalami kekalahan sekali, namun ternyata hal yang sama terulang pada tahun 2009.

³¹ “Abe Push Back in Aim to Japan Military From Constitution”, dalam <http://www.reuters.com/article/2014/03/24/us-japan-defense-constitution-idUSBREA2NOF020140324>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018..

2. Dukungan Amerika Serikat Terhadap Sistem Pertahanan Jepang

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jepang kemudian menjadi negara yang memiliki militer pasif. Dalam menjaga stabilitas dalam negeri dan wilayah, Jepang banyak tergantung dengan Amerika Serikat yang berperan sebagai negara donor bidang pertahanan. Tujuan pokok dari jalinan kerjasama dan pelibatan Amerika Serikat oleh Jepang, baik secara konseptual ataupun kontekstual menurut Departemen Urusan Dalam Negeri Amerika Serikat (*United States Department of States*) adalah sebagai berikut :

*”...sesuai dengan tokoh pendiri negara ini (founding father) maka Amerika Serikat perlu berinteraksi dengan negara lain, bukan hanya untuk kepentingan domestik namun juga seluruh negara dunia. Tujuan politik luar negeri Amerika Serikat adalah untuk menciptakan lebih aman, demokratis dan sejahtera untuk kepentingan Amerika Serikat dan dunia.”*³²

Tujuan praktis, dari pelibatan Amerika Serikat oleh Jepang adalah seperti halnya dengan negara-negara lainnya di dunia, yaitu :³³

- a. Kontrol ekspor-impor.
- b. Langkah terdepan untuk membina hubungan baik dengan negara-negara dunia.
- c. Menjaga bisnis dan usaha, baik nasional ataupun swasta Amerika Serikat di luar negeri.
- d. Memberikan perlindungan bagi warga Amerika Serikat di luar negeri.

Soft diplomasi dalam sejarah politik dan pemerintahan Amerika Serikat juga merupakan

³² “US Department of Stetes : Foreign Policy Agenda” dalam http://www.foreignpolicy.com/category/topic/us_foreign_policy, diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

³³ *Ibid.*

strategi suatu negara ditentukan sepenuhnya oleh kepentingan nasionalnya. Pada konteks negara-negara dunia kepentingan nasional Amerika Serikat pada pokoknya berkisar pada hal-hal sebagai berikut :³⁴

- a. mengusahakan agar sumber-sumber alam negara-negara dunia tidak jatuh ke tangan musuh.
- b. menjamin tersalurnya sumber-sumber alam yang penting bagi industri dan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
- c. memelihara kontinuitas mengalirnya keuntungan investasi dan usaha-usaha komersil Amerika Serikat.
- d. menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen Amerika Serikat di berbagai wilayah dunia.
- e. memutuskan hak transit dan “*overflight*” bagi pesawat udara dan kapal laut.
- f. menjaga eksistensi penguasa-penguasa negara-negara dunia yang menjadi sekutu Amerika Serikat.
- g. mempertahankan diri dari komunis (di masa Perang Dingin) dan kekuatan-kekuatan revolusioner atau fundamentalise Islam yang dapat membahayakan dominasi pengaruh Amerika Serikat dan persekutuan Barat di dunia internasional.

Kemudian modernisasi bidang pertahanan Cina juga mendorong hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat secara mutualistik. Beberapa bentuk pelibatan Amerika Serikat oleh Jepang adalah, yaitu :

- a. Revitalisasi program IMET (*International Military and Education Training*). Program ini merupakan wujud pelatihan yang dijalankan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara dunia,

³⁴ “Bush to Change Again to Foreign Policy Oriented”, <http://www.foxnews.com>., diakses pada tanggal 3 Februari 2018.

namun oleh pemerintah Jepang pada tahun 2007 program ini diminta menjadi program pelatihan rutin yang dijalankan setiap dua kali dalam setahun. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mengantisipasi ancaman dari Cina dan Korea Utara yang semakin mengkhawatirkan.³⁵

- b. Pelibatan Amerika Serikat oleh Jepang dalam latihan bersama secara tripartit dengan Korea Selatan. Beberapa keberhasilan tentang hal ini adalah diselenggarakannya latihan bersama pengamanan wilayah pesisir Timur Jepang yang melibatkan 2.400 personel gabungan pada 23-24 Maret 2008 di semenanjung Korea.
- c. Pengiriman kembali misil jenis Patriot D-196 buatan Amerika Serikat kepada Jepang pada tahun 2009. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat bidang pertahanan Jepang setelah sebelumnya kedua negara sepakat untuk meniadakan misil jarak jauh ini.

Bagaimanapun juga kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat tetap tidak bisa dilepaskan dalam konstelasi politik-keamanan Asia Timur. Pihak berwenang Jepang memiliki kekhawatiran lain selain ancaman dari Korea Utara. Hubungan dengan China juga telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Inilah sebabnya mengapa LDP (*Liberal democratic party*) menyarankan gagasan untuk menciptakan unit laut yang akan digunakan bila mana negara itu diserang dari luar. Pertama-tama, kemungkinan serangan oleh China akan terjadi di kepulauan Senkaku yang telah disengketakan oleh kedua negara sejak lama. Menurut Konferensi Potsdam pasca Perang Dunia II, Jepang harus mengembalikan semua

³⁵ “Jepang berhasil Kembangkan Kerjasama Pelatihan Dengan AS”, Kompas, 22 Mei 2007.

wilayah pendudukan ke China. Kepulauan Senkaku masuk dalam wilayah yang harus dikembalikan.

C. Keterkaitan Dukungan Amerika Serikat Terhadap Jepang Dalam Menangani ICBM Korea Utara

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 1997, dicapai kesepakatan yang disebut “*US-Japan Defense Guideline*” yang menetapkan “*comprehensive planning mechanism*” yang lebih menekankan kerja sama bilateral yang bukan hanya terfokus pada pertahanan wilayah Jepang saja, tetapi juga untuk mengantisipasi gangguan keamanan regional. Menghadapi ancaman nuklir Korea Utara dan penculikan warga Jepang oleh agen Korea Utara, serta masih pekanya hubungan Jepang RRC, meningkatkan sikap nasionalisme di masyarakat dan menguatnya keinginan untuk merevisi konstitusi 1947, agar Jepang segera menjadi negara normal yang memiliki sistem pertahanan aktif.

Amerika Serikat selama ini merupakan negara wali bagi dinamika pertahanan dan keamanan Jepang. Pada akhirnya hal ini dianggap tidak lagi relevan karena persoalan yang dihadapi Jepang tidak semata-mata berkaitan dengan perang konvensional, namun juga terorisme, klandestin hingga perlombaan senjata (arms race). Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Panneta bahwa :

*“...We strongly support the Government of Japan. Prime Minister shinzo Abe has run the right policy. In the past or at present, the United States will remain consistent in supporting the security of Japan and the East Asian region. Paradigm change of defense from passive into active is indeed quite necessary for Japan.”*³⁶

³⁶ “Panneta Says Remain North Korean Seriously Threat”, dalam <https://www.nytimes.com/2011/10/27/world/asia/leon-panetta-lands-in-south-korea-for-talks.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018.

(Kami sangat mendukung pemerintah Jepang. Perdana Menteri shinzo Abe telah menjalankan kebijakan yang tepat. Di masa lalu ataupun saat ini, Amerika Serikat akan tetap konsisten dalam mendukung keamanan Jepang dan wilayah Asia Timur. Perubahan paradigma pertahanan dari pasif menjadi aktif memang cukup diperlukan bagi Jepang)

Adanya anggapan semakin menguatnya ancaman nuklir Korea Utara, pada bulan Juli 2005 majelis tinggi Jepang berhasil mengesahkan amandemen undang undang yang memberi wewenang kepada menteri pertahanan Jepang untuk memerintahkan SDF menembakkan peluru kendali penangkal, apabila ada ancaman serangan peluru kendali dari luar, tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada perdana menteri.

Agenda pertama tentang pergeseran kebijakan pertahanan Jepang akan diwujudkan dengan membahas soal kemungkinan militer Jepang bisa melakukan serangan udara di pangkalan militer musuh. Salah satu dokumen yang menyatakan kemerosotan serius hubungan dengan Korea Utara bisa memaksa pemerintah Jepang untuk mengadakan sejumlah serangan terhadap fasilitas rudal dan nuklir Korea Utara. Tapi yang pertama Jepang harus lakukan adalah melengkapi militernya dengan rudal jelajah jarak pendek dan pesawat pembom strategis.

Pada faktanya Korea Utara telah berulang kali mengancam pemerintah Jepang dengan serangan udara di wilayah mereka. Pertama-tama, itu jelas ada hubungannya dengan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang. Berdasarkan perjanjian tambahan antara Washington dan Seoul, Amerika Serikat akan memberikan semua bantuan militer yang diperlukan dalam hal provokasi apapun yang dilakukan oleh Pyongyang. Hubungan antar kedua negara sangat tegang. Korea Utara telah memindahkan peluncur rudalnya ke pantai timur negara itu, dan kini sudah siap kembali untuk ditembakkan kapanpun.

Setelah saling klaim kedua pejabat ini, pemerintah Jepang mengambil keputusan untuk melengkapi angkatan bersenjata di wilayah itu dengan menambahkan kendaraan serbu amfibi AAV7 dan pesawat canggih Osprey. dikatakan bahwa senjata ofensif Jepang bisa digunakan di segala arah. Tentu saja, pertama-tama senjata Jepang akan diarahkan terhadap DPRK (*Democratic People's Republic of Korea*) Korut. Sistem pertahanan rudal Jepang telah ditingkatkan seiring meningkatnya kekuatan nuklir Korea Utara. Di satu sisi negara itu akan terus menghabiskan miliaran dolar untuk industri militer. Menurut analisis politik dan politisi Jepang, ini terutama karena situasi di semenanjung Korea.

Melalui uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kerjasama Amerika Serikat dan Jepang dalam mengatasi ICBM Korea Utara yang berujung pada berubahnya sistem pertahanan Jepang dari pasif menjadi aktif merupakan upaya untuk mengantisipasi ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi, terlebih lagi pada tahun 2009-2016 Korea Utara semakin intensif dalam menjalankan uji coba senjata ICBM. Dengan berkembangnya sistem pertahanan Jepang menjadi aktif maka negara ini dapat membangun *defense shield* secara mandiri. Bentuk kerjasama selanjutnya antara Amerika Serikat dan Jepang diwujudkan melalui pelatihan bersama hingga dukungan anggaran. Gambaran tentang hal ini akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya (bab IV).